

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2025



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur di persembahkan kehadirat Alla SWT, karna atas limpahan rahmat-Nya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan. Dokumen LKPJ ATA 2025 merupakan Laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pendukung yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1(satu) tahun anggaran.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Sangat disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, serta masih ada kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan selama penyusunan. Namun demikian diharapkan laporan ini dapat dipergunakan sesuai harapan dan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.

Pesisir Selatan, Februari 2026
Plt. Kepala Dinas
Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



HAMDI, S.Pt.,M.Si.

NIP: 19740530 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | |
|------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- | | |
|--|----|
| 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2. Sasaran Strategis | 12 |
| 2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang di Tetapkan dalam Perjanjian Kinerja | 13 |
| 2.4. Kebijakan Strategis | 15 |
| 2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 | 16 |

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTU DAN PENUGASAN

- | | |
|--|----|
| 3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pmerintahan yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasny | 17 |
| 3.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya | 18 |
| 3.3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Dibawahnya. | 19 |

BAB IV PENUTUP 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel, setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi/organisasi perlu dipertanggungjawabkan secara sistematis. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diamanatkan selama periode tertentu. Laporan ini memuat gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, Laporan Kinerja Pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelaksanaan program kerja ke depan dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2025 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
13. Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD;
4. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan;
5. Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 4 program, 9 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.787.981.267,00 dan reasisasi sebesar 4.498.385.972,00 dengan capaian 93.95%.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusa Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Target	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
									(Rp)	(Rp)	
1.	urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	Penunjang Urusan Pemorintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	A(83)	76,53	3.727.507.502	3.685.208.899	98.87%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12 bulan	100%	3.112.794.569	3.091.183.441	99.30%
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan (bulan)	bulan	12 bulan	100%	2.986.507.712	2.965.904.728	99%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (bulan)	bulan	12 bulan	100%	126.286.857	125.278.713	99%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum	bulan	12 bulan	100%	100.054.941	99.791.353	99.73%

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Bulan	12 bulan	100%	6.905.873	6.903.570	99.96%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12 bulan	100%	18.470.290	18.323.630	99.20%
				Penyediaan Barang Dan Cetakan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Bulan	12 bulan	100%	8.966.778	8.949.443	99.80 %
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Makanan dan Minuman Tamu/Rapat Kantor	bulan	12 bulan	100%	4.920.000	4.882.000	99.22%
				Penyelenggaraan Rapat Dan Koordinasi Konsultasi Skpd	Ketersediaan Operasional Rapat-Rapat Dalam dan Luar Daerah	bulan	12 bulan	100%	60.791.999	60.732.710	99.90 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpelihara Barang Milika Daerah	bulan	12 bulan	100%	249.408.001	249.398.615	99.99 %
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12 bulan	100%	112.390.000	112.380.615	99.99 %
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	bulan	12 bulan	100%	12.300.000	12.300.000	100%

				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor dan bangunan Lainnya	bulan	12 bulan	100%	124.718.001	124.718.000	99.99 %
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Dok	12 bulan	100 %	14.750.000	14.640.000	99.25 %
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dok	12 bulan	100 %	14.750.000	14.640.000	99.25 %
				Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12 bulan	100%	250.499.992	230.195.490	91.89 %
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Kantor	bulan	12 bulan	100%	144.499.992	132.195.490	91.48 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	bulan	12 bulan	100%	106.000.000	98.000.000	92.45 %
			Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Kegiatan	12 bulan	100%	927.517.245	737.193.029	79.48%
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan	Kegiatan	12 bulan	100%	553.062.594	428.929.245	77.55 %

				Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-
				Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan		Kegiatan	12 bulan	100%	46.630.000	40.532.200	87%
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-
				Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pemeliharaan TIK dan Pendukung Layanan Digital Perpustakaan	1 paket	12 bulan	100%	3.100.000	3.100.000	100%
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/kota	Pengembangan Konten Literasi Berbasis Kearifan Lokal	310 Orang	5 Kegiatan	100%	303.608.370	189.045.275	62%
				Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan Bahan	jumlah penambahan buku		12 bulan	100%	199.724.224	196.251.770	98.26%
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tingkat kegemaran membaca	kegiatan	12 bulan	100%	374.454.651	308.263.784	82.32%
				Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat	Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca	2 Kegiatan	12 bulan	100%	155.126.878	109.700.723	70.71%

				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pekan literasi	2 Paket	2 Kegiatan	100%	164.478.252	152.068.061	92.45%
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	kegiatan inklusi sosial	1 Kegiatan	12 Bulan	100%	20.749.521	12.400.000	59.76%
				Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pemeliharaan dan biaya operasi anil Mobil Puskel	1 Peket	12 Bulan	100%	34.100.000	34.095.000	99.98%
			Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kegiatan	12 Bulan	100%	42.956.500	2.792.000	6.50%
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Naskah Kuno	1 Kegiatan	12 Bulan	100%	42.956.500	2.792.000	6.50%
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno	1 Kegiatan	12 Bulan	100%	42.956.500	2.792.000	6.50%
				Program Pengelolaan kearsipan	Indeks Pemanfaatan Arsip	tingkat ketersediaan Arsip	12 Bulan	100%	90.000.029	73.192.044	81.32%
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	pembinaan dan pengawasan arsip	1 kegiatan	12 Bulan	100%	90.000.029	73.192.044	81.32%

				Penciptaan Penggunaan Dinamis	Dan Arsip	kegiatan pembinaan	1 kegiatan	12 Bulan	100%	54.295.117	38.215.210	70.38%
				Pengawasan Dinamis Kabupaten/ kota	Arsip Kewenangan	Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Arsip	1 kegiatan	12 Bulan	100%	35.704.912	34.976.834	97.96%

2.2. Sasaran Strategis

NO	Sasaran	Indikator Kerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian %	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (83)	76.53	92.20 %	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.727.507.502	3.685.208.899	98.87 %
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	88	91	103.41 %				
3	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20.8	3.15 Nilai Sementara	15.14 %	Program Pembinaan Perpustakaan	927.517.245	737.193.029	79.48 %
						Program Pelestarian Naskah Kuno Nasional	42.956.500	2.792.000	6.50%
4	Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Pemanfaatan Arsip	50			Program Pengelolaan Arsip	90.000.029	73.192.044	81.32 %
CAPAIAN KINERJA							4.787.981.276	4.498.385.972	93.95 %

2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang di Tetapkan dalam Perjanjian Kinerja

A. SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 83 (A), realisasi 76,53 dengan capaian 92,20%.

Indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian PAN RB yang nilainya dikeluarkan pada akhir tahun atau awal tahun untuk tahun sebelumnya.

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

1. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : 3.727.507.502

Realisasi Anggaran : 3.685.208.899

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4) Fasilitas Kunjungan Tamu

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

d. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Nilai Kematangan Inovasi target kinerja 88, realisasi nilai 91 capaian kinerja 103,41%.

C. SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Literasi Masyarakat dengan indikator kinerja IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) dengan target 20,8 terealisasi 3,15(masih hasil Sementara) dengan capaian kinerja 15,14%.

Indikator kinerja ini dinilai langsung oleh Perpustnas dari target sampel yang diberikan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pagu Anggaran : 927.517.245

Realisasi Anggaran : 737.193.029

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan

2) Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan

3) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/kota

4) Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

5) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/kota

6) Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat
- 2) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- 3) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- 4) Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Pagu Anggaran : 42.956.500

Realisasi Anggaran : 2.792.000

a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno

D.SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikato kinerja indeks Pemanfaatan Arsip Target 50, Indikator kinerja ini hasil evaluasi dari ANRI dalam kegiatan Pengawasan dan penilaian kabupaten setiap tahunnya belum terbit (Menunggu SK Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI)

1. Program Pengelolaan kearsipan

Pagu Anggaran : 90.000.029

Realisasi Anggaran : 73.192.044

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penciptaan Dan Penggunaan Arsip Dinamis
- 2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota

2.4 Kebijakan Strategis

Pada tahun 2025 kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Program Pembinaan Perpustakaan

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

A. Pengembangan Layanan Berbasis Digital:

1. Pengembangan infrastruktur digital, termasuk peningkatan kecepatan internet, server, dan sistem penyimpanan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan perpustakaan digital.
2. Digitalisasi koleksi untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

B. Peningkatan Minat Baca dan Literasi:

1. Kolaborasi dengan sekolah dan instansi lain melalui layanan perpustakaan keliling.
2. Peningkatan layanan inovatif dan kreatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
3. Penyediaan sarana pendidikan untuk mendukung peningkatan literasi dan kemampuan berpikir kritis siswa.

C. Penguatan Kompetensi Pengelola:

1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas pustakawan dalam mengelola perpustakaan secara modern dan berbasis teknologi.

D. Pemasaran dan Jangkauan (Aksesibilitas):

1. Kampanye melalui media sosial dan kolaborasi dengan media lokal.
2. Penggunaan selebaran dan poster di area publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan perpustakaan.

2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

-NIHIL

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTU DAN PENUGASAN

3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya.

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan menerima anggaran tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sebesar Rp. 750.000.000,00.

Realisasi Keuangan DAK NF 2025

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan									
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Realisasi Penggunaan tahap 1	sisa anggaran tahap 1	Persentase Output tahap 1	Realisasi Penggunaan tahap 2	Persentase Output tahap 2	realisasi 2025	Sisa Dana Akhir
		Jumlah	Satuan								
I	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah			750.000.000	303.060.369	446.939.631	40,41	228.272.890	30,44	531.333.259	218.666.741
1	Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi			623.213.500	222.541.169	400.672.331	35,71	228.272.890	36,63	450.814.059	172.399.441
A	Gerakan Pembudayaan Membaca	250	Orang	155.126.878	39.075.523	116.051.355	25,19	70.625.200	45,53	109.700.723	45.426.155
B	Pengembangan Konten Literasi Berbasis Kearifan Lokal	310	Orang	303.608.370	139.753.565	163.854.805	46,03	49.291.710	16,24	189.045.275	114.563.095
C	Pekan Literasi Daerah	2	Paket	164.478.252	43.712.081	120.766.171	26,58	108.355.980	65,88	152.068.061	12.410.191
2	Pembinaan dan Pendataan Perpustakaan dan Naskah Kuno Nusantara			89.586.500	43.324.200	46.262.300	48,36	0	-	43.324.200	46.262.300
A	Pendataan Perpustakaan	1	Kegiatan	46.630.000	40.532.200	6.097.800	86,92	0	-	40.532.200	6.097.800
B	Identifikasi dan Pendaftaran Naskah Kuno Nusantara	1	Kegiatan	42.956.500	2.792.000	40.164.500	6,50	0	-	2.792.000	40.164.500
3	Operasional Layanan Perpustakaan			37.200.000	37.195.000	5.000	99,99	0	-	37.195.000	5.000
A	Pemeliharaan TIK Pendukung Layanan Digital Perpustakaan	1	Paket	3.100.000	3.100.000	0	100,00	0	-	3.100.000	0
B	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling	1	Paket	34.100.000	34.095.000	5.000	99,99	0	-	34.095.000	5.000

Pesisir Selatan 11 Desember 2025
Pit. Kepala Dinas

Hamdi, S.P., M.Si
NIP: 19740530 200003 1 005

3.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

A. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Standar biaya Daerah kabupaten Pesisir Selatan untuk hadiah lomba lebih rendah dari jumlah yang tertera di Juknis DAKNF tahun 2025 dengan rincian

Tingkat Kabupaten	Pelajar	Umum
Juara I	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000
Juara II	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
Juara III	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
Favorit	Rp. 1.000.000	Rp. 1.250.000

Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan

Target kegiatan sudah tercapai sesuai KAK seperti lomba video konten literasi dan lomba bertutur namun realisasi anggaran kecil dan anggaran hadiah lomba berlebih. Pemenang lomba video konten literasi mewakili provinsi Sumatera Barat memperoleh peserta terbaik tingkat nasional a.n. Iif Wulansari dengan judul "Sunyi bersama Jingga"

Penggantian transportasi dan uang harian peserta juga mengalami kelebihan anggaran dari yang dialokasikan dikarenakan standar biaya daerah yang rendah sehingga peserta tidak banyak yang berasal dari kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten Pesisir Selatan oleh sebab uang penggantian transportasi yang kecil tidak sesuai dengan real cost yang dikeluarkan peserta (Kecamatan terdekat IV Jurai Rp. 50.000 dan yang terjauh Rp. 150.000).

2. Masalah perjalanan dinas yang efisiensi menyebabkan peserta kegiatan hanya memperoleh salahsatu seperti penggantian transportasi atau uang harian saja dikarenakan anggaran uang harian terletak di rekening perjalanan dinas (kode rekening : 5.1.02.04.01.0003)

3. Rendahnya Literasi Digital

Masih rendahnya literasi digital masyarakat sehingga setiap informasi kegiatan di media sosial perpustakaan tidak begitu diketahui oleh Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan

3. Upaya Penyelesaian Dalam menjalankan Tugas pembantuan

1. Menyesuaikan biaya untuk hadiah lomba sesuai dengan standar biaya daerah.
2. Mencari peserta lomba dari ibu kota Pesisir Selatan dan kecamatan yang terdekat dengan Painan.
3. Penyampaian informasi kegiatan di Perpustakaan dengan melakukan promosi di media social rekan-rekan kerja dan penyampaian secara langsung kepada pemustaka yang datang.

3.3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Dibawahnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun anggaran 2025 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan Urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkat bawahannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai Desember 2025 memiliki capaian 93.95%. dalam melaksanakan 4 program, 9 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.787.981.267,00 dan realisasi sebesar 4.498.385.972,00.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2025 mendapatkan bantuan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat (Perpustakaan Nasional) sebesar Rp.750.000.000,00.
3. Dokumen LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 akan menjadi masukan terhadap penyusunan LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.